

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis penelitian pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) di LEMIGAS belum optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, diataranya dari aspek:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pendapatan

Pendapatan LEMIGAS diakui pada saat diterbitkannya *invoice* setelah selesainya suatu pekerjaan jasa pelayanan dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Uji (LHU). Namun dalam prakteknya masih terdapat *invoice* yang diterbitkan tidak sesuai dengan waktu berakhirnya suatu pekerjaan jasa pelayanan, keterlambatan penerbitan *invoice* bisa dua sampai tiga bulan dari berakhirnya jasa pelayanan. Sehingga pengakuan pendapatan

tidak akrual karena tidak sesuai dengan saat terjadinya peristiwa.

Untuk pembayaran pelunasan atas jasa pelayanan, pelanggan dapat membayar melalui *virtual account* atau melalui transfer antar bank. Namun masih terdapat uang masuk yang belum dapat diidentifikasi, sehingga belum dapat diakui sebagai pendapatan dan belum dapat digunakan untuk operasional LEMIGAS. Perlu dilakukan penelusuran agar dapat disahkan oleh bendahara penerimaan untuk diakui sebagai pendapatan. Proses pengidentifikasian membutuhkan waktu yang lama, terkadang bisa sampai melewati periode pelaporan.

b. Beban

Kualitas piutang digolongkan berdasarkan umur piutang sesuai dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Masih terdapat ketidaksesuaian penggolongan kualitas umur piutang dengan peraturan, sehingga berdampak pada potensi beban piutang tidak tertagih.

Pengakuan barang persediaan di LEMIGAS diakui bukan pada saat barang diterima namun berdasarkan barang dibayar atau berdasarkan kwitansi pembayaran. Hal ini tidak sesuai

dengan sistem akuntansi berbasis akrual dimana barang diakui dan dicatat pada saat diterima, sehingga pencatatan penggunaan persediaan tidak dapat dilakukan secara *real time*.

c. Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih atau *invoice* diterbitkan. *Invoice* diterbitkan sudah dapat dicatat sebagai piutang dan diakui sebagai pendapatan LEMIGAS. Permasalahannya sama seperti pengakuan pendapatan yang sudah disebutkan di atas, yaitu keterlambatan penerbitan *invoice* sehingga pengakuan piutang tidak sesuai dengan sistem akuntansi berbasis akrual dimana piutang diakui pada saat terjadinya kejadian yaitu pada saat timbulnya hak untuk menagih atas selesainya suatu pekerjaan jasa pelayanan dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Uji (LHU).

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual dari aspek pengakuan dan pengukuran masih belum optimal.

2. Penyajian Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian laporan realisasi anggaran terutama pada akun pendapatan masih belum optimal, karena masih terdapat uang masuk yang belum diakui sebagai pendapatan.

b. Laporan Operasional

Penyajian laporan operasional pada akun beban persediaan dan beban penyisihan piutang tak tertagih masih belum optimal. Masih terdapat pengakuan piutang dan persediaan yang tidak menerapkan basis akrual sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Neraca

Penyajian Kas pada BLU di Neraca tidak sama dengan rekening koran tahun 2020. Perbedaan ini dikarenakan ada pencairan bank garansi yang belum disahkan oleh KPPN, sehingga belum tercatat di Kas dan bank BLU.

Penyajian piutang dan penyisihan piutang tak tertagih di Neraca juga belum menggambarkan basis akrual karena masih terdapat kesalahan dalam pencatatan pengakuan piutang dan penggolongan kualitas umur piutang.

Penyajian nilai persediaan di Neraca belum optimal karena dalam pencatatan persediaan masuk dan persediaan keluar belum sepenuhnya menggunakan basis akrual. Sehingga belum menggambarkan kejadian atau peristiwa yang sesungguhnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual dari aspek Penyajian Laporan Keuangan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

3. Kualitas

Secara umum laporan keuangan LEMIGAS sudah dapat dikatakan berkualitas karena sudah memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan mendapat opini WTP dari BPK untuk tiga tahun terakhir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran mengenai penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual di LEMIGAS, sebagai berikut:

1. Aspek Pengakuan dan Pengukuran

a. Pendapatan

- Menginstruksikan Bendahara Penerimaan, Pengelola Urusan PNB, dan Koordinator Unit/KPPPT selaku penerima pekerjaan melakukan rekonsiliasi setiap bulan terkait *invoice* terbit dan *invoice* yang sudah terbayar. Sehingga pengakuan pendapatan dan piutang dapat lebih optimal.
- Pengelola Urusan PNB agar mengarahkan kepada pelanggan untuk menggunakan *virtual account* dalam hal pembayaran dan tidak lagi menggunakan transfer rekening antar bank. Sehingga dapat meminimalisir uang masuk tidak teridentifikasi.

b. Beban

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa agar mengikutsertakan petugas persediaan dalam hal penerimaan barang persediaan dan memberikan dokumen berupa *hardcopy* atau *softcopy* untuk diinput oleh petugas persediaan.
- Menginstruksikan petugas persediaan menginput barang masuk berdasarkan barang diterima sesuai dengan tanggal faktur barang atau surat jalan pengiriman barang dari pihak ketiga.

c. Piutang

Menginstruksikan kepada Pengelola Urusan PNBP LEMIGAS agar menyusun umur piutang dan membuat kartu piutang sesuai dengan dokumen tagihan sehingga penentuan kualitas Piutang Jasa Layanan sesuai kondisi sebenarnya dan tertib.

2. Aspek Penyajian Laporan Keuangan

Menginstruksikan kepada Bendahara Penerimaan dan penyusun laporan keuangan atau operator aplikasi SAIBA melakukan rekonsiliasi setiap bulannya antara rekening koran dengan laporan keuangan terkait penyajian Kas dan Bank BLU.

3. Aspek Kualitas

Menginstruksikan Kepala Subkoordinator Keuangan melakukan pengawasan internal secara intensif dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- David Wijaya, (2017). *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hans Kartikahadi, dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamaluddin, Apiaty. (2017). *Administrasi Bisnis*. Makassar: CV Sah Media.
- Kasmir, Dr. (2018), *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. (2016), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Rahman, Mariati. (2017), *Ilmu Administrasi*, Makasar: CV Sah Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suprihanto, John. (2014), *Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soeradi. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)*, Yogyakarta: Ekuilibria.
- Sutha, Diah Wijayanti. (2018), *Administrasi Perkantoran Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum*, Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Wahjono, Sentot. I. dkk. (2019), *Pengantar Manajemen*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wijayanto, Dian. (2012), *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

Wahyudi, Indra (2019). Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Eliada Herwiyanti (2021). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19 No. 1, 2017.

C. Skripsi

Oktaviani, Firda (2021). Analisis Pemanfaatan dan Efektivitas Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) Pada Penyusunan Laporan Keuangan. (Studi Kasus Pada Kantor Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI), Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Selawati, Nur (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan DiKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri. Tahun 2021. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Tahun 2014
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

E. Dokumen-Dokumen

Pedoman Penulisan Tugas Akhir STIA-LAN (2000)

Laporan Keuangan Tahunan LEMIGAS (Tahun 2019, 2020, dan 2021)

Laporan Simak Persediaan (Tahun 2019, 2020, dan 2021)

F. Sumber Internet

<https://www.kemenkeu.go.id/> (Diakses 1 September 2022)

<https://kbbi.web.id/uang/> (Diakses 22 Agustus 2022)

<https://www.djpb.kemenkeu.go.id/> (Diakses 19 Agustus 2022)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses 19 Agustus 2022)

<https://www.lemigas.go.id/> (Diakses 15 Agustus 2022)

J A K A R T A



LAMPIRAN

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**